

Judul : Pengusaha Sesalkan DPR Tolak Subsidi EBT  
Tanggal : Jumat, 23 September 2016  
Surat Kabar : Rakyat Merdeka  
Halaman : 14

## Masa Depan Kedaulatan Energi Terancam Pengusaha Sesalkan DPR Tolak Subsidi EBT

PENGUSAHA listrik menyalskan sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR yang menolak subsidi energi baru terbarukan (EBT). Dewan menolak pemberian subsidi EBT yang diajukan pemerintah senilai Rp 1,1 triliun pada tahun depan.

Ketua Harian yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Listrik Seluruh Indonesia (APLSI) Arthur Simatupang mengatakan, penolakan tersebut mempengaruhi masa depan kedaulatan energi. Selain itu, komitmen kerja sama internasional di bidang lingkungan bakal terancam.

"Bagaimana komitmen negara kita menurunkan gas emisi kaca pada tahun 2030 sebesar 29 persen dengan upaya sendiri dan 41 persen dengan bantuan atau kerjasama internasional pada pertemuan COP 21 tentang perubahan iklim," katanya di Jakarta, kemarin.

Ia mengatakan, pemerintah sudah seharusnya mendorong realisasi pengembangan energi terbarukan secara besar-besaran. Dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN), di sana juga telah dipatok target porsi EBT sebesar 23 persen dalam bauran energi hingga 2025.

"Untuk mencapai target itu, salah satu kebijakan yang diperlukan adalah subsidi EBT,"

katanya. Sejalan dengan Arthur, Wakil Bendahara Umum APLSI Rizka Armadhana mengatakan, pihaknya sangat menyalskan penolakan subsidi itu.

"APLSI sangat menyalskan subsidi energi terbarukan ditolak Banggar," ujar dia. Dikatakannya, pengembangan EBT sangat penting dan strategis bagi kedaulatan energi nasional.

DPR dan pemerintah diharapkan bisa menawarkan skema insentif atau pembiayaan lain untuk menjaga ketahanan energi nasional. Pihaknya juga mengusulkan alternatif subsidi. "Misalnya seyogyanya pengembangan EBT di satukan ke dalam anggaran subsidi PLN, seperti energi primer lainnya (gas/diesel) dan tidak dipisah-pisahkan," katanya.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Rida Mulyana mengatakan, pihaknya akan tetap berjuang mendapat pendanaan dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2017, untuk pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT) sebesar Rp 1,1 triliun.

Ia mengatakan, penolakan tersebut bukan berarti DPR tidak mendukung pengembangan EBT. Mata anggarannya yang tertera adalah subsidi. "Banggar dukung

EBT, yang ditolak mata anggarannya, nomenklatur pos keuangan. Bukan insentifnya," kata Rida.

Menurut dia, insentif tersebut masih bisa diajukan dengan mengubah konteks subsidi dengan mata anggaran lain. Untuk itu, Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan akan mencari solusi untuk menyerahkan insentif tersebut dalam APBN 2017.

"Ini sudah disampaikan ke Bu Menkeu, dan langsung perintahkan ke Dirjen Anggaran cari jenis lain untuk ini, jadi uangnya belum dicoret tapi jangan pakai subsidi, jenis belanja lain untuk mengakomodir insentif ini," tutup Rida.

Deputi II Bidang Sumber Daya dan Jasa Kemenko bidang Kemaritiman Agung Kuswandono mengatakan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) merupakan wujud komitmen pemerintah untuk meningkatkan peran EBT dalam bauran energi primer.

Sebab, kata dia, pemerintah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional menargetkan peran EBT dalam bauran energi nasional dapat meningkat hingga 23 persen pada 2025. ■ Asi

DPR - RI